Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

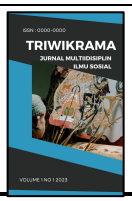

IMPLEMENTASI GERAKAN AJE KENDOR DALAM PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KOTA SERANG

Kineta Azra Utami Anandita[1], Listyaningsih[2]
[12] Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

6661210115@untirta.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini membahas implementasi program Gerakan Aje Kendor (GAKS) dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Serang. Tingginya angka anak putus sekolah menjadi salah satu dampak pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi pemerataan akses pendidikan. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kota Serang menginisiasi Gerakan Aje Kendor Sekolah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, serta Keputusan Walikota Serang Nomor 421/Kep.236-Huk/2023 tentang Pembentukan Tim Gerakan Aje Kendor Sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah telah berjalan dan memberikan capaian dalam penanganan anak putus sekolah, meskipun masih terdapat hambatan berupa resistensi perilaku dan faktor budaya masyarakat.

Kata Kunci : Gerak Aje Kendor; Anak Putus Sekolah, Implementasi Program; Kebijakan Publik

A B S T R A C T

This study examines the implementation of the Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) program in addressing school dropout children in Serang City. The high number of school dropouts is one of the impacts of population growth that is not balanced with equitable access to education. As an effort to address this issue, the Serang City Government initiated the Gerakan Aje Kendor Sekolah program based on Serang City Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Education Implementation, Government Regulation Number 47 of 2008 concerning Compulsory Education, and the Mayor of Serang Decree Number 421/Kep.236-Huk/2023 concerning the Establishment of the Gerakan Aje Kendor Sekolah Team. This study aims to analyze the implementation of the program using the policy implementation theory of Van Meter and Van Horn, which includes policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing agencies, implementers' disposition, inter-organizational communication, and economic, social, and political environments. This research employed a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of the Gerakan Aje Kendor Sekolah program has been carried out and has achieved progress in handling school dropout children, although there are still obstacles in the form of behavioral resistance and cultural factors within the community.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

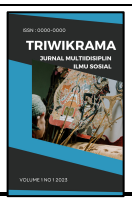

Keywords *: Aje Kendor Movement; School Dropouts; Program Implementation; Public Policy.*

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan sebuah proses humanisasi atau upaya memanusiakan manusia. (Freire, 2005) Di Indonesia, hak atas pendidikan telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena anak putus sekolah yang hingga kini masih menjadi persoalan serius dalam sistem pendidikan nasional.

Putus sekolah dipahami sebagai kondisi ketika seorang peserta didik tidak mampu menuntaskan jenjang pendidikan tertentu, sehingga berstatus sebagai mantan peserta didik dan kehilangan kesempatan melanjutkan ke jenjang berikutnya (Gunawan, 2010). Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih relatif tinggi, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun 2023, persentase anak laki-laki putus sekolah pada jenjang SMP mencapai 7,97%, sedangkan perempuan sebesar 5,86%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jenjang Sekolah Dasar (SD) yang berada di bawah 1%. (*Badan Pusat Stastik Indonesia*, 2024)

Pada level regional, Provinsi Banten masih menghadapi persoalan anak putus sekolah yang cukup serius. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, jumlah anak putus sekolah tingkat SMA di Provinsi Banten selama tahun 2022–2024 mencapai 746 siswa. Kabupaten Serang menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yaitu 260 siswa, disusul Kabupaten Tangerang sebanyak 225 siswa. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025) Meskipun Kota Serang memiliki jumlah yang lebih rendah dibandingkan kabupaten lain, fenomena anak putus sekolah di wilayah ibu kota provinsi tetap menjadi perhatian karena Kota Serang merupakan pusat pemerintahan dan pendidikan di Provinsi Banten.

Permasalahan serupa juga terjadi di Kota Serang, khususnya pada jenjang SMP. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menunjukkan bahwa angka anak putus sekolah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 110 anak putus sekolah, meningkat menjadi 224 anak pada tahun 2023, dan melonjak menjadi 1.498 anak pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya angka partisipasi sekolah dengan kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan hingga tuntas.

Tabel 1. Jumlah Anak Putus Sekolah Tingkat SMP di Kota Serang Tahun 2022-2024

Data Putus Sekolah			Total
Tahun	**Laki-laki**	**Perempuan**	
2022	73	37	110
2023	108	116	224
2024	811	687	1.498
Total	**181**	**153**	**1.832**

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, 2024

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara tingginya angka partisipasi sekolah dengan masih tingginya jumlah anak yang mengalami putus sekolah. Artinya, meskipun akses pendidikan dasar dan menengah pertama telah relatif merata, kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan pendidikan hingga tuntas masih menjadi persoalan serius. Fenomena ini memperlihatkan bahwa permasalahan pendidikan di Kota Serang tidak lagi hanya berkaitan

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

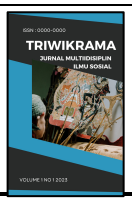

dengan akses pendidikan, melainkan telah bergeser pada isu keberlanjutan pendidikan dan retensi siswa. Lebih lanjut, data anak putus sekolah tingkat SMP di Kota Serang tersebar di enam kecamatan, dengan Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak hanya terjadi pada wilayah pinggiran, tetapi juga pada kawasan pusat pemerintahan dan perkotaan di Kota Serang.

Tabel 2. Data Anak Putus Sekolah Tingkat SMP per Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun			Total
		2022	2023	2024	
1.	Kasemen	79	61	411	551
2.	Serang	-	26	301	327
3.	Cipocok Jaya	-	20	96	116
4.	Taktakan	-	23	113	136
5.	Walantaka	-	7	137	144
6.	Curug	-	15	106	121
Jumlah		**79**	**152**	**1.164**	**1.395**

Sumber: Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Serang, 2024

Berdasarkan Tabel 4, jumlah anak putus sekolah tingkat SMP di Kota Serang mengalami peningkatan yang signifikan dan tersebar di seluruh kecamatan. Pada tahun 2022, kasus putus sekolah hanya tercatat di Kecamatan Kasemen sebanyak 79 anak. Namun, pada tahun 2023 jumlah tersebut meningkat menjadi 152 anak dan mulai tersebar di Kecamatan Serang, Cipocok Jaya, Taktakan, Walantaka, dan Curug. Peningkatan paling drastis terjadi pada tahun 2024 dengan total 1.164 anak putus sekolah. Kecamatan Kasemen menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi sebanyak 411 anak, diikuti Kecamatan Serang sebanyak 301 anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anak putus sekolah di Kota Serang semakin meluas dan tidak lagi hanya terjadi pada wilayah tertentu, melainkan telah menjadi persoalan pendidikan daerah yang membutuhkan penanganan kebijakan secara terintegrasi. Sebagai upaya penanganan, Pemerintah Kota Serang melaksanakan Program Gerakan Aje Kendor Sekolah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Program ini bertujuan mengembalikan anak putus sekolah agar dapat kembali memperoleh layanan pendidikan formal maupun nonformal. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, ketidaksinkronan data anak putus sekolah, keterbatasan sumber daya manusia, serta pendekatan kebijakan yang masih berfokus pada bantuan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan optimal dalam menekan angka anak putus sekolah secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan program Gerakan Aje Kendor Sekolah belum sepenuhnya didukung oleh perumusan indikator keberhasilan yang tertuang secara formal dalam dokumen perencanaan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan yang bersifat tetap, konsisten, dan menjadi pedoman tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan tidak hanya berkaitan dengan keputusan yang diambil pemerintah, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan adalah *whatever government chooses to do or not to do*, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan maupun ketidaktindakan pemerintah memiliki tujuan dan dampak terhadap

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

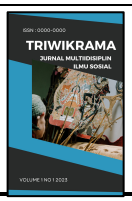

masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pada hakikatnya mencakup apa yang dilakukan, alasan, pelaksana, lokasi, serta cara pelaksanaannya dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat. Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh aktor yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Sementara itu, Carl Friedrich memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Nugroho (2014), kebijakan publik memiliki dua karakteristik, yaitu mudah dipahami karena berorientasi pada pencapaian tujuan nasional dan mudah diukur melalui tingkat pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan pemerintah yang mengikat untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat demi mencapai tujuan bersama.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan tujuan kebijakan melalui tindakan nyata. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang mengidentifikasi masalah, tujuan, dan mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, Lester dan Stewart Jr. menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat diukur dari proses pelaksanaan dan pencapaian hasil akhir (output). Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan upaya melaksanakan kebijakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn karena mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Model ini terdiri atas enam variabel, yaitu: (1) ukuran dan tujuan kebijakan, yang menjelaskan kejelasan tujuan dan indikator pencapaian; (2) sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, dana, dan waktu; (3) karakteristik agen pelaksana, yang mencakup organisasi dan pihak yang terlibat dalam implementasi; (4) sikap para pelaksana, yaitu komitmen dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan; (5) komunikasi antarorganisasi, yang mendukung koordinasi dan kelancaran pelaksanaan kebijakan; serta (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, yang dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena implementasi kebijakan secara mendalam berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara peneliti terlibat langsung untuk mengamati, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan, serta menarik kesimpulan terhadap proses implementasi program yang berlangsung secara alami.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para pelaksana program, meliputi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

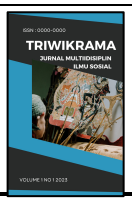

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Baznas Kota Serang, Bappeda Kota Serang, pihak kecamatan, PKBM, sekolah, siswa putus sekolah, serta orang tua siswa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti kebijakan pemerintah, surat keputusan wali kota, dokumentasi kegiatan, hasil rekaman wawancara, foto kegiatan penelitian, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 16 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan relevansinya terhadap implementasi Program Gerakan Aje Kendor dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Serang.

Tabel 3. Informan Penelitian

Jenis Informan	Informan	Status Informan
Key Informan	H. Ahmad Nuri, M,Si	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
	Ade Rochmawati	Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
	Nadia Hashifah Rizkasanti	Kepala Bidang SMP dan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
	Najib Halim Sy, S.E.	Kepala Bidang pnegumpulan Baznas Kota Serang
Secondary Informan	Tiara Agusti Caesarany	Jabatan Fungsional AKPD Bappeda Kota Serang
	Agung Ginanjar W	Sekertaris Kecamatan Serang
	Tuti Sumiyati, S.Pd	Kepala Seksi PMK Kecamatan Walantaka
	Jakar, S.Pd	Kepala Seksi PMK Kecamatan Kasemen
	Rini Ratna Ningsih, S.Pd.I	Kepala Sekolah SDN Gelam 4
	Sri Liawati, S.Sos	Guru BK SMPN 20 Kota Serang
	Nina Kurniasih, S.Pd	Kepala Satuan PKBM Al-kahfi
	Siti Nur	Orang tua siswa (anak putus sekolah PKBM AL-Kahfi)
	Adjan	Siswa APS PKBM AL - Kahfi
	Noviyanti	Orang tua siswa (anak putus sekolah SMPN 20 Kota Serang)
	Fahri	Siswa putus sekolah SMPN 20 Kota Serang
	Halimatusadiah	Orang tua siswa (anak putus sekolah SDN Gelam 4)
	Arya	Siswa putus sekolah SDN Gelam 4

Sumber: Peneliti, 2025

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

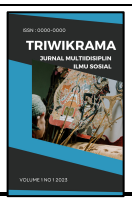

Berdasarkan tabel informan penelitian, masing-masing informan memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan Program Gerakan Aje Kendor dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Serang. Informan dipilih secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta pemahaman yang relevan terhadap implementasi program sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang valid, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi empat tahapan, yaitu: (1) pengumpulan data, yang dilakukan melalui observasi langsung terhadap para pelaksana Implementasi Gerakan Aje Kendor dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Serang; (2) reduksi data, yaitu proses menganalisis, mengelompokkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik serta memverifikasi kesimpulan; (3) **penyajian data (data display)**, yaitu menyusun data secara sistematis dan terpadu agar mudah dipahami sehingga mendukung proses penarikan kesimpulan; serta (4) **penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification)**, yaitu melakukan verifikasi terhadap hasil pengumpulan, reduksi, dan penyajian data untuk memastikan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan temuan penelitian.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas melalui dua teknik, yaitu triangulasi dan member check. Triangulasi dilakukan dengan memeriksa data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai teknik, dan pada waktu yang berbeda. Penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber, serta triangulasi teknik, yaitu menguji keabsahan data dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Selain itu, member check dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan. Apabila hasil penelitian disepakati oleh pemberi data, maka data tersebut dinyatakan valid dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan penafsiran yang signifikan, peneliti melakukan penyesuaian terhadap temuan berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi di Provinsi Banten. Secara administratif, Kota Serang terdiri atas 6 kecamatan dan 67 kelurahan dengan luas wilayah mencapai 266,72 km^2. Pada tahun 2023 jumlah penduduk Kota Serang mencapai 723.794 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2.719 jiwa/km^2. Kondisi wilayah Kota Serang yang heterogen, mulai dari kawasan perkotaan padat hingga wilayah penyangga, memengaruhi pemerataan akses pelayanan pendidikan sehingga diperlukan kebijakan pendidikan yang adaptif dan merata. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Serang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang sebagai leading sector dalam pelayanan pendidikan dasar dan nonformal. Kota Serang memiliki 223 SD negeri, 39 SD swasta, 30 SMP negeri, 57 SMP swasta, dan 40 PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan sebagai sarana pendukung pendidikan formal maupun nonformal. Dalam penanganan anak putus sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan Bidang Pembinaan SD dan SMP, Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal (PNF), serta Sekretariat Dinas dalam proses pendampingan, fasilitasi pendidikan kesetaraan, dan dukungan administrasi program.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

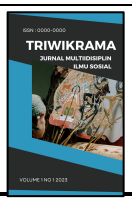

Implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang merupakan inovasi kebijakan yang bertujuan menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pendekatan jemput bola (outreach). Program ini dilaksanakan melalui empat strategi utama, yaitu validasi data anak putus sekolah, kunjungan rumah (home visit), fasilitasi anak kembali bersekolah, dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah. Selain itu, program ini juga melibatkan kerja sama lintas sektor bersama Bappeda dan Baznas dalam mendukung sinkronisasi data serta bantuan pendanaan bagi keluarga kurang mampu. Penelitian ini mengkaji implementasi program menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang meliputi enam indikator: ukuran dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta aktivitas implementasi, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

1. Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian, ukuran dan tujuan kebijakan dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang secara normatif diarahkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan serta menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS). Program ini dilaksanakan melalui upaya pengembalian anak ke jalur pendidikan formal maupun nonformal dengan mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Indikator keberhasilan program secara umum diukur melalui jumlah ATS/APS yang teridentifikasi, jumlah anak yang kembali bersekolah, serta capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum didukung oleh indikator keberhasilan dan target capaian yang ditetapkan secara formal dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan Rencana Aksi Daerah (RAD). Kondisi tersebut menyebabkan implementasi program berjalan tanpa ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur. Berdasarkan hasil wawancara, jumlah anak putus sekolah di Kota Serang mencapai sekitar 10.000 anak, sementara capaian pengembalian anak ke sekolah baru berkisar 1–2 persen atau sekitar 80–200 anak. Meskipun anggaran program telah terserap sepenuhnya, hasil yang dicapai dinilai belum optimal dalam menekan angka putus sekolah secara signifikan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya indikator baku menyebabkan pelaksanaan GAKS cenderung bersifat reaktif terhadap kasus anak putus sekolah yang muncul di lapangan, bukan berbasis pada target kinerja tahunan yang terencana. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah provinsi yang masih baru dilaksanakan turut memengaruhi belum terbentuknya standar evaluasi program secara menyeluruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) belum dirumuskan secara jelas, terukur, dan terstruktur sehingga berdampak pada sulitnya mengukur efektivitas program secara objektif dan berkelanjutan dalam penanganan anak putus sekolah di Kota Serang.

2. Sumber Daya

Dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang meliputi sumber daya manusia, finansial, serta sarana dan prasarana yang mendukung penanganan anak putus sekolah. Dari aspek sumber daya manusia, pelaksanaan program dinilai cukup memadai karena melibatkan Bidang SD, SMP, dan PAUD/Nonformal yang masing-masing memiliki pembagian tugas yang jelas dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS). Selain itu, pelaksanaan program juga didukung melalui koordinasi lintas sektor dengan kecamatan dan kelurahan sebagai pihak yang memahami kondisi wilayah dan masyarakat secara langsung.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar 1. Bantuan Perlengkapan Belajar di PKBM Al-Kahfi

Sumber: Peneliti, 2025

Dari gambar diatas, Pemerintah Kota Serang telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung pelaksanaan program, termasuk bantuan perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, dan peralatan belajar bagi anak yang kembali bersekolah. Pada tahun 2025, alokasi program ditujukan untuk sekitar 50 anak jenjang SMP, 50–100 anak SD, dan sekitar 200 peserta didik pendidikan nonformal. Bantuan tersebut menjadi bentuk intervensi ekonomi untuk mengurangi hambatan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Namun demikian, jumlah anggaran yang tersedia masih dinilai belum proporsional dibandingkan dengan total anak putus sekolah di Kota Serang yang mencapai sekitar 10.000 anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan sarana dan prasarana, terutama pada jalur pendidikan nonformal (PKBM). Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa fasilitas laboratorium komputer untuk pelaksanaan ujian berbasis digital masih sangat terbatas, sehingga proses pembelajaran dan evaluasi belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian peserta didik harus menggunakan perangkat pribadi untuk mengikuti ujian daring. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya dalam implementasi GAKS sudah cukup mendukung dari sisi sumber daya manusia dan dukungan program bantuan pendidikan. Namun, keterbatasan anggaran dan belum meratanya fasilitas pendidikan masih menjadi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kerja sama lintas sektor, serta pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pada pendidikan nonformal, agar pelaksanaan program dapat menjangkau lebih banyak anak putus sekolah secara efektif dan berkelanjutan.

3. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana kebijakan dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang menunjukkan adanya struktur organisasi yang bersifat kolaboratif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Tim pelaksana program terdiri atas unsur pemerintah daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Baznas, kecamatan, kelurahan, sekolah, PKBM, hingga organisasi masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya upaya integrasi dalam penanganan anak putus sekolah, baik pada aspek perencanaan, pendataan, pendampingan, maupun pembiayaan pendidikan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Gambar 2. Pola Koordinasi pengembalian Anak Tidak Sekolah Di Kota Serang

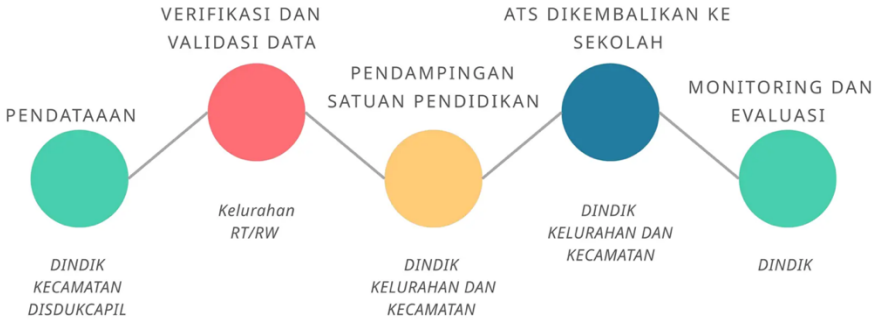

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, 2025

Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan bahwa pembagian peran antarinstansi telah berjalan relatif jelas. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengembalian anak ke satuan pendidikan. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan berfungsi melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi anak putus sekolah di lapangan. Sekolah dan PKBM berperan sebagai pelaksana teknis yang menerima serta mendampingi anak untuk kembali mengikuti pendidikan formal maupun nonformal. Pola koordinasi antarinstansi dilakukan secara berjenjang melalui proses pendataan, verifikasi lapangan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi program. Dari sisi kompetensi, pelaksana program dinilai cukup memadai dan didukung oleh koordinasi lintas sektor yang berjalan secara rutin. PKBM sebagai lembaga pendidikan nonformal juga didukung oleh tutor yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai bidangnya serta memperoleh pelatihan peningkatan mutu dari Dinas Pendidikan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kewenangan yang masih terpusat pada Dinas Pendidikan menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi kurang fleksibel dan berpotensi memperpanjang proses pengembalian anak ke sekolah. Selain itu, meskipun tidak ditemukan tumpang tindih peran yang signifikan, masih terdapat potensi duplikasi inisiatif antarinstansi yang memerlukan penguatan mekanisme koordinasi agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan efisien dalam menangani anak putus sekolah di Kota Serang.

4. Sikap atau Kecendungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang menunjukkan kecenderungan yang positif dan mendukung terhadap keberhasilan program. Pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memahami tujuan sosial program sebagai upaya mengembalikan hak pendidikan anak putus sekolah. Pemahaman tersebut dibangun melalui kegiatan sosialisasi, briefing, pendampingan, serta pemberian studi kasus yang dilakukan secara rutin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang.

Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Program Gerak Aje Kendor

Sumber: Peneliti, 2025.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

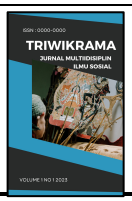

Pada gambar di atas, terlihat bahwa kegiatan briefing dan sosialisasi program Gerak Aje Kendor telah dilaksanakan kepada masyarakat di Kota Serang. Menunjukkan bahwa pelaksana memiliki komitmen dan konsistensi dalam menjalankan program, mulai dari proses pendataan, verifikasi, pencarian lokasi anak putus sekolah, hingga pengembalian anak ke satuan pendidikan formal maupun nonformal.

Peneliti melakukan observasi terhadap satuan pendidikan (sekolah dan PKBM) yang menunjukkan sikap proaktif dalam memberikan pembimbingan khusus bagi siswa yang kembali bersekolah guna meminimalisir risiko drop out berulang. Komitmen ini menjadi faktor penguat (sentripetal) di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran yang ada. Pendekatan persuasif dan humanis yang diterapkan pelaksana menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan motivasi anak untuk kembali mengikuti pendidikan. Namun demikian, proses birokrasi dan koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Secara keseluruhan, disposisi pelaksana menjadi faktor pendorong utama dalam implementasi GAKS karena didukung oleh komitmen, pemahaman tujuan kebijakan, serta kepedulian sosial yang tinggi terhadap penanganan anak putus sekolah di Kota Serang.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang berjalan melalui pola koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Baznas, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi digital, serta komunikasi langsung kepada masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, dan pengembalian anak putus sekolah ke satuan pendidikan. Keterlibatan perangkat kewilayahan dinilai membantu mempercepat identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) karena pihak RT/RW dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi telah mendukung sinkronisasi pelaksanaan program, terutama dalam proses validasi data anak putus sekolah. Namun demikian, masih ditemukan kendala miskomunikasi terkait ketidaksesuaian data dan proses verifikasi lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang telah terdata belum hadir saat proses verifikasi sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian ke sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem komunikasi dan integrasi data antarinstansi belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain faktor komunikasi, penelitian juga menemukan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi hambatan utama dalam implementasi program.

Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tuntutan anak untuk bekerja membantu orang tua, serta praktik pernikahan dini menjadi penyebab dominan anak mengalami putus sekolah. Rendahnya motivasi belajar dan pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan turut memengaruhi keberhasilan program dalam mengembalikan anak ke sekolah. Dari sisi politik, program GAKS memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari program prioritas pendidikan Kota Serang. Namun demikian, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan regulasi, target capaian, dan sistem kebijakan yang terinstitusionalisasi secara jelas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana telah berjalan cukup baik, tetapi efektivitas implementasi program masih memerlukan penguatan koordinasi, integrasi data, serta intervensi yang lebih komprehensif terhadap faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat agar tujuan penanganan anak putus sekolah dapat tercapai secara optimal.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

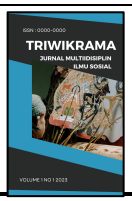

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Komunikasi antar organisasi dalam implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang berjalan melalui pola koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Baznas, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi, komunikasi digital, serta komunikasi langsung kepada masyarakat dalam proses pendataan, verifikasi, dan pengembalian anak putus sekolah ke satuan pendidikan. Keterlibatan perangkat kewilayahan dinilai membantu mempercepat identifikasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) karena pihak RT/RW dinilai lebih memahami kondisi masyarakat di lingkungannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antarinstansi telah mendukung sinkronisasi pelaksanaan program, terutama dalam proses validasi data anak putus sekolah. Namun demikian, masih ditemukan kendala miskomunikasi terkait ketidaksesuaian data dan proses verifikasi lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa anak yang telah terdata belum hadir saat proses verifikasi sehingga menyebabkan keterlambatan pengembalian ke sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem komunikasi dan integrasi data antarinstansi belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan sistem informasi yang lebih akurat dan terintegrasi. Selain faktor komunikasi, penelitian juga menemukan bahwa kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya menjadi hambatan utama dalam implementasi program.

Gambar 4. Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak Putus Sekolah

Sumber: Peneliti, 2025

Dokumentasi di atas menunjukkan bahwa kendala utama program berasal dari faktor struktural ekonomi dan sosiokultural masyarakat. Kondisi ekonomi yang lemah memaksa anak untuk bekerja, sementara rendahnya kesadaran orang tua menyebabkan pendidikan dianggap bukan prioritas utama, serta praktik pernikahan dini menjadi penyebab dominan anak mengalami putus sekolah. Rendahnya motivasi belajar dan pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikan turut memengaruhi keberhasilan program dalam mengembalikan anak ke sekolah.

Dari sisi politik, program GAKS memperoleh dukungan dari pemerintah daerah dan menjadi bagian dari program prioritas pendidikan Kota Serang. Namun demikian, dukungan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan regulasi, target capaian, dan sistem kebijakan yang terinstitusionalisasi secara jelas. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana telah berjalan cukup baik, tetapi efektivitas implementasi program masih memerlukan penguatan koordinasi, integrasi data, serta intervensi yang lebih komprehensif terhadap faktor ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat agar tujuan penanganan anak putus sekolah dapat tercapai secara optimal.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

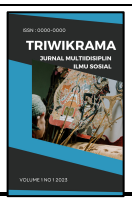

PEMBAHASAN

Ukuran dan Sasaran Kebijakan

Ukuran dan sasaran kebijakan merupakan variabel penting dalam model implementasi Van Meter dan Van Horn karena menentukan arah serta keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) memiliki tujuan yang jelas, yaitu menurunkan angka Anak Putus Sekolah (APS) dan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui pengembalian mereka ke pendidikan formal maupun nonformal. Program ini juga telah menetapkan sasaran pada anak usia 7–18 tahun dan keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS. Namun, indikator keberhasilan belum dirumuskan secara formal dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RAD sehingga pelaksanaan program belum memiliki target yang terukur. Kondisi ini menghambat proses monitoring dan evaluasi. Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Dwi Komalasari dan Novia Wahyu Wardhani (2024) serta Handika Pratama Yudha (2024) yang menunjukkan pentingnya indikator keberhasilan yang jelas dalam implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan indikator capaian yang terukur agar pelaksanaan GAKS lebih efektif dan akuntabel.

Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan GAKS relatif memadai dengan pembagian tugas yang jelas serta didukung pelatihan dan koordinasi lintas sektor. Dukungan anggaran melalui APBD juga dimanfaatkan untuk penyediaan perlengkapan sekolah dan kegiatan pendataan. Namun, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana, khususnya pada pendidikan nonformal seperti PKBM, masih menjadi kendala sehingga intervensi belum mampu menjangkau seluruh anak putus sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Handika Pratama Yudha (2024) dan Dwi Komalasari dan Novia Wahyu Wardhani (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas menjadi hambatan utama implementasi kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan anggaran, peningkatan sarana pendukung, serta kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga filantropi.

Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana GAKS menunjukkan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Baznas, kecamatan, kelurahan, serta satuan pendidikan. Kompetensi pelaksana dinilai baik dan didukung oleh keberadaan PKBM sebagai alternatif pendidikan. Meskipun demikian, koordinasi antarinstansi belum sepenuhnya optimal dan kewenangan pelaksana di tingkat kelurahan masih terbatas sehingga proses pengambilan keputusan cenderung lambat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Handika Pratama Yudha (2024) serta Dwi Komalasari dan Novia Wahyu Wardhani (2024) yang menekankan pentingnya koordinasi dan pembagian peran dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, penguatan koordinasi antarinstansi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam implementasi GAKS tergolong baik, ditunjukkan oleh komitmen dan pemahaman pelaksana dalam mengembalikan hak pendidikan anak melalui pendataan, verifikasi, sosialisasi, dan pendekatan persuasif kepada keluarga. Guru juga memberikan pendampingan bagi anak yang kembali bersekolah. Namun, proses birokrasi yang panjang dan belum optimalnya dukungan lintas sektor masih menghambat respons cepat terhadap kasus tertentu. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuke Nathasya (2023) yang menyatakan bahwa komitmen pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penyederhanaan birokrasi dan penguatan kerja sama lintas sektor perlu dilakukan.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

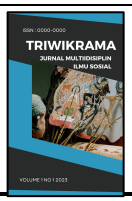

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antarorganisasi dalam pelaksanaan GAKS telah dilakukan melalui rapat koordinasi, media komunikasi daring, serta koordinasi dengan perangkat wilayah. Mekanisme tersebut mendukung proses pendataan dan pengembalian anak ke sekolah. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian data dan belum adanya prosedur komunikasi yang baku sehingga koordinasi belum berjalan optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi Komalasari dan Novia Wahyu Wardhani (2024) yang menegaskan pentingnya komunikasi yang jelas dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem informasi dan standar komunikasi antarinstansi.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik berpengaruh terhadap implementasi GAKS. Faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, budaya yang tidak memprioritaskan sekolah, serta praktik pernikahan dini masih menjadi penyebab tingginya angka anak putus sekolah. Dari sisi politik, pemerintah daerah telah memberikan dukungan melalui program Serang Cerdas, namun belum didukung regulasi teknis dan target anggaran yang memadai. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yuke Nathasya (2023) yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan sosial merupakan hambatan utama implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta peningkatan edukasi masyarakat agar pelaksanaan GAKS dapat berjalan secara berkelanjutan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Gerakan Aje Kendor Sekolah (GAKS) di Kota Serang telah berjalan cukup baik melalui pendekatan jemput bola dalam menangani Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS). Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Pendidikan, Bappeda, Baznas, kecamatan, kelurahan, sekolah, dan PKBM dalam proses pendataan, pendampingan, hingga pengembalian anak ke satuan pendidikan formal maupun nonformal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, dan komitmen pelaksana sudah cukup mendukung pelaksanaan program. Namun, implementasi GAKS masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya indikator dan target kebijakan yang jelas, keterbatasan anggaran dan sarana pendidikan, kendala komunikasi data antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi masyarakat seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, dan pernikahan dini. Dengan demikian, implementasi GAKS telah menunjukkan upaya positif pemerintah Kota Serang dalam menekan angka anak putus sekolah, tetapi belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan anggaran dan fasilitas pendidikan, integrasi data antarinstansi, serta dukungan sosial masyarakat agar pelaksanaan program dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

Saran

a) Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RAD) agar pelaksanaan program lebih terarah dan akuntabel.
b) Alokasi anggaran harus ditingkatkan untuk menjangkau seluruh anak putus sekolah, termasuk penyediaan fasilitas teknologi di PKBM dan dukungan transportasi bagi siswa.
c) Perlu dibangun protokol koordinasi yang baku antarinstansi serta mekanisme rujukan terpadu untuk mempercepat proses pengembalian anak ke sekolah.
d) Prosedur birokrasi harus disederhanakan agar pelaksana di tingkat kelurahan dan sekolah dapat merespons kasus secara cepat dan efektif.
e) Strategi sosialisasi harus diperluas melalui pendekatan kultural dan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengubah persepsi negatif terhadap pendidikan.

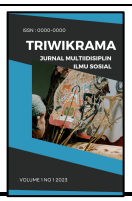

f) Program penanganan anak putus sekolah perlu diintegrasikan dengan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar hambatan finansial dapat diatasi secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Purwatiningsih. (2024) .Implementasi Kebijakan UU No.20 Tahun 2003 dalam Menangani Anak Putus Sekolah di Kota Malang. Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14, No. 1.

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi di Indonesia. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol 21 No 2, 88-98.

Kurniawan,R.(2023).Implementasi Program Pendidikan Nonformal dalam Mengatasi Anak Putus S ekolah di Kabupaten Bandung.raxis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 12, No. 2, 45-60.

Agustino, L. (2019). Dasar-dasar Kebijakan Publik Alfabeta . Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudyaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kota Serang Tahun 2025-2029

Surat Putusan Wali Kota Serang Nomor: 421/Kep236-Huk/2023 Tentang Komitmen Replikasi Inovasi Pelayanan Publik

Bantenkita.com. 2024.PII Banten Soroti Angka Anak Putus Sekolah di Banten yang melambung Tinggi https://bantenkita.com/2024/07/25/pii-banten-soroti-angka-anak-putus-sekolah-di-banten-yang-melambung-tinggi/ diakses 2 januari 2025

Bantenintens. 2024. Waduh, Ada 1.752 Anak Putus Sekolah di Kota Serang https://bantenintens.co.id/2024/07/16/waduh-ada-1-752-anak-putus-sekolah-di-kota-serang/, diakses 2 Januari 2025

Ppid.serangkota.go.id 2023 pastikan hak Pendidikan anak terpenuhi, pemkot serang Bersama USAID Susun program Pengembealian anak putus sekolah https://ppid.serangkota.go.id/detailpost/pastikan-hak-pendidikan-anak-terpenuhi-pemkot-serang-bersama-usaid-susun-program-pengembalian-anak-putus-sekolah diakses 2 januari 2025